BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistem akuntabilitas yang disusun untuk mewujudkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program setiap instansi pemerintah. Dalam hal ini, Instansi Pemerintah secara periodik wajib menyampaikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada *stakeholders* melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh merupakan salah satu satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang berkomitmen untuk mengimplementasikan akuntabilitas kinerja dalam manajemen pemerintahan. Salah satu bentuk komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh adalah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2019, menjabarkan rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2019 diperlukan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada waktu yang akan datang.

Banda Aceh, 01 Februari 2020

a.n. Plt.Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Banda Aceh
Sekretaris

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BKPSDM

Nurhasanah, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19681214 199312 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi 4

1.4 Sarana dan Prasarana 6

1.5 Sistematika Penyajian 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA **9**

2.1 Perencana Strategis 9

2.2 Rencana Kerja, Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 15

2.3 Perjanjian Kinerja 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **28**

3.1 Capaian Kinerja 28

3.2 Realisasi Anggaran 41

BAB IV PENUTUP **47**

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja
2. Rencana Strategik (formulir RS)
3. Perjanjian Kinerja
4. Rencana Kerja Tahunan (Formulir RKT)
5. Pengukuran Kinerja (Formulir PK)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh menurut Tingkat Pendidikan Golongan Kepangkatan, dan Diklat Kepemimpinan 6

Tabel 1.2 Daftar Aset BKPSDM Kota Banda Aceh 6

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh 13

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2018 18

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2018 24

Tabel 3.1 Predikat Capaian Kinerja 31

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi 33

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi 35

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi 36

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi 38

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 39

Tabel 3.7 Program dan Kegiatan BKPSDM Kota Banda Aceh tahun Anggaran 2019 43

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran BKPSDM Kota Banda Aceh 45

Tabel 3.9 Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2015 Sampai Dengan 2019 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh (BKPSDM) menyusun media pertanggung jawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2019. Dengan adanya LKjIP tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Banda Aceh bagi Walikota, dan pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholder)*.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penyusunan kebijakan tehnis bidang kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, yang telah ditetapkan dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia.

Adapun yang menjadi latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah;

1. Sebagai laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalan Renstra.
2. Untuk mengukur indikator input, output dan outcome sebagai pertanggungjawaban dan dapat mencapai sasaran apa yang telah direncanakan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun berdasarkan Intruksi Presiden No 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas kenerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Sebagai evaluasi Kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan secara terarah, terpadu dan terukur.
3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.
4. Menjelaskan secara strategis tahapan target yang akan dicapai melalui indikator *input*, *output* dan *outcome* dalam rangka pencapaian visi dan misi serta sasaran strategi yang telah dicapai selama Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang di jabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan Rencana Pembangunan Strategi Lima Tahun Pemerintah Kota Banda Aceh dan dijabarkan lagi dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.

Maksud dan tujuan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh adalah sebagai sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang diperoleh Tahun Anggaran 2019 dan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja untuk merumuskan stategi pemecahan

masalah sehingga capaian kinerja dapaat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Menindaklanjuti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh, ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.

Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai kewenangan:

a. Menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN;
d. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
e. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir Aparat Sipil Negara;
f. Melaksanakan dan mengelola mutasi dan tata usaha kepegawaian;
g. Mengumpulkan bahan pelaksanaan ujian dinas dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
h. Membina dan membantu teknis penyelenggaraan diklat;
i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
j. Menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir ASN; dan
k. Mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh, diperlukan adanya dukungan

sejumlah personil (pegawai) yang cakap, berkualitas, profesional dan berdedikasi tinggi.

Secara keseluruhan, jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebanyak 59 orang yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh menurut Tingkat Pendidikan Golongan Kepangkatan, dan Diklat Kepemimpinan

No.	Uraian		Jumlah (orang)	Persentase
1	Golongan	II	8	13,56%
		III	38	64,41%
		IV	13	22,04%
	Jumlah		59	100%
2	Tingkat Pendidikan	SLTA	6	10,17%
		Diploma III	6	10,17%
		Diploma IV	3	5,09
		Strata I	29	49,16%
		Strata II	15	25,43%
	Jumlah		59	100 %

1.4 Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2
Daftar Aset BKPSDM Kota Banda Aceh

No.	Uraian	Volume	Ket
1	Tanah	1 Unit	Baik
2	Gedung BKPSDM	1 Unit	Baik
3	Gedung ITLC	1 Unit	Baik
4	Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit	Baik
5	Kendaraan Dinas Roda 2	8 Unit	Baik
6	Meja ½ Biro	27 Unit	Baik
7	Meja Kerja Eselon II	1 Unit	Baik
8	Meja Kerja Eselon III	4 Unit	Baik
9	Meja Kerja Eselon IV	12 Unit	Baik
10	Meja Kerja Staf	30 Unit	Baik
11	Kursi Kerja Eselon II	1 Unit	Baik
12	Kursi Kerja Eselon III	4 Unit	Baik
13	Kursi Kerja Eselon IV	12 Unit	Baik
14	Kursi Kerja Staf	32 Unit	Baik
15	Kursi Susun	150 Unit	Baik

16	UPS	48 Unit	Baik
17	Komputer	72 Unit	Baik
18	AC	32 unit	Baik
19	Laptop	4 Unit	Baik
20	Infokus	3 Unit	Baik
21	Printer	36 Unit	Baik
22	Rak Arsip	3 Unit	Baik
23	Kipas Angin	2 unit	Baik
24	Meja Komputer	16 Unit	Baik
25	Vertikal Blind	355 Meter	Baik
26	Komputer Server	1 unit	Baik
27	Rak Server	1 Unit	Baik
28	Kamera CCTV	18 unit	Baik
29	Air Phone PABX	10 Unit	Baik
30	Lemari Arsip Tempahan	5 Unit	Baik
31	Container Arsip	16 Unit	Baik
32	Meja Bundar	10 Unit	Baik
33	Meja Sice	3 Unit	Baik
34	Kursi Belajar	67 Unit	Baik
35	Scan Snap	6 Unit	Baik
36	Lemari Tempahan 6 Pintu	1 Unit	Baik

1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota Banda Aceh selama Tahun 2019. Capaian kinerja *(performance results)* Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja *(performance agreement)* Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasikannya sejumlah celah kinerja *(performance gap)* bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

1.4. Sarana dan Prasarana

1.5. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategi SKPD Tahun 2017-2022

2.2. Rencana Kerja, Program, Kegiatan SKPD Tahun 2019

2.3. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2019

BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

Lampiran-lampiran:

1. Rencana Strategik (formulir RS)
2. Perjanjian Kinerja
3. Rencana Kerja Tahunan (Formulir RKT)
4. Pengukuran Kinerja (Formulir PK)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik sosial, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional sesuai Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Penyusunan Perencanaan Strategis ini disusun untuk menjabarkan lebih lanjut Visi dan Misi Kota Banda Aceh ke dalam (yang juga menjadi) Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh. Renstra merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berhubungan dengan pengungkapan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh mengacu pada RPJM Kota Banda Aceh tahun 2017-2022, yang menggambarkan wilayah kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh berupa Visi, Misi, Strategi pencapaian kinerja dan faktor pendukungnya. Renstra ini

merupakan dokumen penting bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sebagai pedoman kerja yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai komitmen untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Banda Aceh yang Baik.

A. Visi dan Misi

1. Visi

"Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah"

Dalam Visi Walikota Banda Aceh tahun 2017-2022 terdapat 3 (tiga) kata penting yaitu "GEMILANG" dan "BINGKAI SYARIAH" agar tidak multi tafsir, maka berikut ini dijabarkan arti kata-kata tersebut.

Gemilang adalah suatu kondisi terang, gemerlap, berkilau, mengagumkan, dan terpandang dalam tiga pilar utama yaitu: agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dan kemasyuran dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah adalah mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan berlandaskan kepada Syariat Islam.

2. Misi

Searah dengan pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017-2022, telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi yaitu :

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BKPSDM Kota Banda Aceh sejalan dengan Misi - 5 Kota Banda Aceh yang Tertuang di dalam RPJM Kota Banda Aceh 2017-2022 yaitu: "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". Misi ini dimaksudkan untuk memberikan alasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

B. Tujuan dan Sasaran

Penetapan target – target yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh bersifat kualitatif dan kuantitatif dimana pencapaian target merupakan ukuran keberhasilan yang didasarkan pada visi dan misi yang telah disusun.

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh sebagai komitmen dalam mendukung RPJM Kota Banda Aceh yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.

Adapun yang menjadi Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan. Adapun yang menjadi tujuan program BKPSDM Kota Banda Aceh adalah:

1. Mewujudkan Pemerintah yang profesional.

2. Sasaran

Sasaran merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dan memiliki kurun waktu tertentu. Sasaran program jangka menengah yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh adalah:

1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta indicator kinerjanya disajikan dalam table sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Banda Aceh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Mewujudkan Pemerintah yang Profesional	Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	1	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	35%	20%	70%
			2	Persentase Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	-	-	95%	96%	96%
			3	Persentase Updating Data Kepegawaian	-	-	70%	73%	75%
			4	Jumlah Penurunan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	-	-	32	32	25
			5	Persentase Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi (Assesment)	-	-	-	-	15%
			6	Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	-	-	82%	82%	82%

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah : Perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik, proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mengimplimentasikan pelaksanaan program kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh untuk 5 (lima) tahun mendatang. Strategi yang akan diterapkan berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai.

1. Mengembangkan sistem pelayanan informasi manajemen kepegawaian yang berintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Strategi yang dikembangkan adalah menigkatkan kemampuan aparatur dalam penguasaan teknologi informasi dan mengupayakan agar jaringan informasi kepegawaian terintegrasi dengan semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan instansi terkait lainnya.
2. Mengembangkan kompetensi aparatur secara optimal, produktif dan professional berbasis kinerja dalam rangka peningkatan karier berlandaskan prinsip-prinsip *Good Governance*. Strategi ini diarahkan pada peningkatan kompetensi aparatur agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, dan

adanya upaya peningkatkan produktifitas dan profesionalisme aparatur sehingga tercipta pola pembinaan karier aparatur yang berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

3. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang islami. Strategi yang dikembangkan dalam pelaksanaan program kegiatan ini adalah dengan mengikut sertakan aparatur secara berjenjang dalam diklat penjenjangan umum dan struktural seperti Diklat Prajabatan, Diklat PIM IV, III,dan II, Diklat Teknis Fungsional yang dipelopori oleh Banda Aceh Academy (BAA) sebagai wadah pengembangan kapasitas dan integritas Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh serta melibatkan aparatur untuk lebih meningkatkan jenjang pendidikannya melalui pemberian izin belajar dan tugas belajar.
4. Meningkatkan pembinaan disiplin dan kesejahteraan aparatur. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan pembinaan displin aparatur demi terciptanya suasana kerja yang kondusif dan nyaman serta menjamin adanya keadilan perlakuan untuk semua aparatur pemerintah. Strategi ini juga diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan aparatur melalui pemberian *reward* dan *punishman*.

2.2 Rencana Kerja, Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh menyusun program dan kegiatan dalam RKT 2019 dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun Anggaran 2019 telah melaksanakan 6 (Enam) Program dan 29 (Dua Puluh Sembilan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 4 (Empat) kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah
2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 13 (Tiga belas) kegiatan sebagai berikut :

1. Seleksi penerimaan calon PNS
2. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
3. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
4. Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
5. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
7. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
8. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
11. Seleksi dan Rekruitmen Tenaga Honorer/Kontrak
12. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
13. Pelaksanaan Proses Seleksi Jabatan.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan 2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	1.	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan
		2.	Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor yang di sediakan	12 bulan
		3.	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	80 Jenis
		4.	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang disediakan	14 jenis
		5.	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 jenis
		6.	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	6776 porsi
		7.	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	40 Laporan
		8.	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan	12 bulan
Meningkatnya Saranan dan Prasarana	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	9.	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	12 bulan
		10.	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang dilaksanakan	2 kali
		11.	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan	120 kali
		12.	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dilaksanakan	240 kali
Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	13.	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan yang disediakan	63 orang
Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	14.	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis	10 orang

Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	15.	Jumlah peserta Diklat Prajabatan	130 orang
	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	16.	Jumlah PNS/Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat PIM IV, PIM III dan PIM II	PIM IV 30 org, PIM III 5 org dan PIM II 2 org
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	17.	Jumlah peserta Seleksi CPNSD/ PPPK	130 orang
	Persentase Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	18.	Persentase Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis bagi ASN	96%
	Persentase Updating Data Kepegawaian	19.	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang Tertib Administrasi berbasis Elektronik	75%
	Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	20.	Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan PNS	1 dokumen
	Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	21.	Jumlah PNS yang mendapatkan Penghargaan	15 orang
	Jumlah Penurunan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	22.	Jumlah Penanganan Kasus-kasus PNS	25 orang
	Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	23.	Jumlah Laporan Tugas Belajar, IzinBelajar dan IkatanDinas	87 Laporan
	Persentase Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	24.	Jumlah peserta Diklat Teknis/Fungsional dan Kepemimpinan	1200 orang

	Persentase Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi (Assesment)	25.	Jumlah instansi yang dilaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian	8 OPD, 3 UPTD, 1 UPTB, 16 SD dan 4 SMP
	Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	26.	Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	8 kali pelantikan
	Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	27.	Jumlah Tenaga Non PNS yang dievaluasi Kinerja Sesuai Kebutuhan	50 orang
	Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	28.	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 keg
	Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	29.	Jumlah Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	3 kali

2.3 Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat pentingantara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Pentingkarena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus

dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Sebagaimana telah kami perjanjikan dengan Walikota Banda Aceh terdapat intisari kegiatan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran	No	Indikator kinerja			%
		Uraian	Target	Realisasi	
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal.	1.	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran	No	Indikator kinerja			%
		Uraian	Target	Realisasi	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1.	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100%
	2.	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	100%
	3.	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional yang dilaksanakan	120 kali	120 kali	100%
	4.	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dilaksanakan	240 kali	114 kali	48%

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Disiplin Aparatur

Sasaran	No	Indikatorkinerja			%
		Uraian	Target	Realisasi	
Meningkatnya Disiplin Aparatur	1.	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan yang disediakan	-	-	-

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur

Sasaran	No	Indikator kinerja			%
		Uraian	Target	Realisasi	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis	10 orang	6 Orang	60%

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki Standar Kompetensi

Sasaran	No	Indikatorkinerja			%
		Uraian	Target	Realisasi	
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	1.	Jumlah peserta Diklat Prajabatan	130 orang	114 Orang	88%
	2.	Jumlah PNS/Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat PIM IV, PIM III dan PIM II	-	-	-

SasaranStrategis6:Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Sasaran	No	Indikatorkinerja			%
		Uraian	Target	Realisasi	
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	1.	Jumlah peserta Seleksi CPNSD/ PPPK	130 Orang	253 Orang	195%
	2.	Persentase Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis bagi ASN	96%	96%	100%

	3.	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang Tertib Administrasi berbasis Elektronik	75%	75%	100%
	4.	Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan PNS	1 dokumen	1 dokumen	100%
	5.	Jumlah PNS yang mendapatkan Penghargaan	15 Orang	16 Orang	107%
	6.	Jumlah Penanganan Kasus-kasus PNS	25 Orang	13 Orang	52%
	7.	Jumlah Laporan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas	87 Laporan	86 Laporan	99%
	8.	Jumlah peserta Diklat Teknis/Fungsional dan Kepemimpinan	1200 Orang	807 Orang	67%
	9.	Jumlah instansi yang dilaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian	8 OPD, 3 UPTD, 1 UPTB, 16 SD dan 4 SMP	8 OPD, 3 UPTD, 1 UPTB, 16 SD dan 4 SMP	100%
	10.	Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	8 kali pelantikan	3 Kali Pelantikan	38%
	11.	Jumlah Tenaga Non PNS yang dievaluasi Kinerja Sesuai Kebutuhan	50 Orang	166 Orang	332%
	12.	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 keg	1 keg	100%
	13.	Jumlah Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	3 kali	1 kali	33%

Penetapan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Banda Aceh Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Program /Kegiatan	Anggaran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal.	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah**		**1.**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.845.737.520**
	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan	1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	467.353.126
	Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor yang di sediakan	12 bulan	1.2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.120.500
	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	80 Jenis	1.3	Penyediaan alat tulis kantor	87.662.300
	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang disediakan	14 jenis	1.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	119.412.850
	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 jenis	1.5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.509.044
	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	6776 porsi	1.6	Penyediaan makanan dan minuman	93.369.700
	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	40 Laporan	1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	520.250.000
	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang	12 bulan	1.8	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	530.060.000

		disediakan				
Meningkatnya Saranan dan Prasarana		**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**		**2.**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**291.846.349**
		Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	10 jenis	2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	110.610.000
		Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang dilaksanakan	2 kali	2.2	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	9.500.000
		JumlahPemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan	120 kali	2.3	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	59.862.400
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dilaksanakan	240 kali	2.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	111.873.949
Meningkatnya Disiplin Aparatur		**Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah**		**3.**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	0
		Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan yang disediakan	63 orang	3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	0
Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur		**Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis**		**4.**	**Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur**	**26.000.000**
		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis	10 orang	4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	26.000.000
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN		**Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis**		**5.**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**1. 019.087.500**

		Jumlah peserta Diklat Prajabatan	130 orang	5.1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	1.019.087.500
		Jumlah PNS/ Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat PIM IV, PIM III dan PIM II	PIM IV 30 org, PIM III 5 org dan PIM II 2 org	5.2	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	0
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN		**Persentase meningkatnya kualitas kinerja aparatur**		**6.**	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**3.688.002.500**
		Jumlah peserta Seleksi CPNSD/ PPPK	130 orang	6.1	Seleksi Penerimaan Calon PNS	715.190.000
		Persentase Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis bagi ASN	96%	6.2	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	95.450.000
		Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang Tertib Administrasi berbasis Elektronik	75%	6.3	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	41.000.000
		Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan PNS	1 dokumen	6.4	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	65.680.000
		Jumlah PNS yang mendapatkan Penghargaan	15 orang	6.5	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	152.650.000
		Jumlah Penanganan Kasus-kasus PNS	25 orang	6.6	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	41.820.000
		Jumlah Laporan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas	87 Laporan	6.7	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	1.485.600.000
		Jumlah peserta Diklat Teknis/ Fungsional dan Kepemimpinan	1200	6.8	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	144.682.500

		Jumlah instansi yang dilaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian	8 OPD, 3 UPTD, 1 UPTB, 16 SD dan 4 SMP	6.9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	126.895.000
		Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	8 kali pelantikan	6.10	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	61.850.000
		Jumlah Tenaga Non PNS yang dievaluasi Kinerja Sesuai Kebutuhan	50 orang	6.11	Seleksi dan Rekruitmen Tenaga Honorer/Kontrak	97.160.000
		Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 keg	6.12	Pembinaan dan Peningkatan kapasitas aparatur	64.475.000
		Jumlah Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	3 kali	6.13	Pelaksanaan Proses Seleksi Jabatan	595.550.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara revieu atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator, sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh 2017-2022 dan dokumen Rencana Kerja Tahun 2019.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan keterangan tentang ukuran *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) yang harus dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan memudahkan dalam penilaian terhadap efektifitas pencapaian kinerja organisasi sehingga dapat diketahui apakah strategi yang dijalankan tersebut benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator

kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi, dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Syarat-syarat indikator kinerja:

1. Spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi
2. Dapat diukur secara objektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif
3. Berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat maupun dampak.
4. Mempunyai efektifitas biaya yang tinggi
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan
6. Relevan; berhubungan secara langsung dan secara logis dengan tujuan, sasaran, strategi, dan fungsi.
7. Efektif; datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis, dengan biaya yang tersedia.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia umumnya menggunakan dana dan Sumber Daya Manusia sebagai indikator masukan. Sedangkan indikator keluaran dan hasil tergantung dari bermacam kegiatan yang dilaksanakan. Satuan indikator kinerja dapat berupa rupiah, orang, persentase atau set.

Capaian kinerja merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan tertentu. Capaian kinerja harus berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal

seperti manusia, uang, peralatan, dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara revieu atas laporan kinerja. Pelaporan kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja dilakukan melalui perjanjian/penetapan kinerja kemudian dibandingkan dengan realisasi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh melakukan pengukuran indikator kinerja sasaran berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Dokomen Rencana Tahun 2019 dan Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2019 dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui kinerja dapat diketahui sejauh mana keberhasilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dalam merealisasikan target jangka menengah dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahunan untuk mendukung tercapainya tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh yang akan berimplikasi terhadap suksesnya visi dan misi.

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja ada 3 program utama yang melekat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh antara lain :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Predikat capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	>100 %	Melebihi/ melampaui target
2	=100 %	Sesuai target
3	<100 %	Tidak mencapai target

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan 1 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja

Dalam rangka mengukur kinerja tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh mempedomani pada dokumen perjanjian kinerja Tahun 2019 dengan tingkat capaian realisasi sebagai berikut :

- Indikator persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (target 130 orang) capaian realisasi 114 orang;
- Indikator persentase kenaikan Pangkat ASN tepat waktu (target 96%) capaian realisasi 96% (sesuai dengan target yang diperjanjikan)
- Indikator Persentase Akurasi Updating Data Kepegawaian ditargetkan 75% capaian realisasi 75%;
- Indikator jumlah penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin ditargetkan 25 orang dengan capaian 13 orang;
- Indikator Proses penempatan ASN sesuai dengan analisis Jabatan target 82% capaian realisasi 70%;
- Tugas Belajar 2 orang Ikatan Dinas IPDN 68 orang dan Izin Belajar (D4 Politeknik 84 orang, dan S2 11 orang);

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh tahun 2019 disusun dengan mengukur capaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019.

Pada Tahun Anggaran 2019, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh

menetapkan 1 (satu) sasaran srategis yang akan dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran kinerja sebagaimana sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh, maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat Realisasi Tahun Anggaran 2019 dengan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi 2019

Sasaran	Uraian	Indikator Kinerja		
		Target	Realisasi(keuangan)	%
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	- Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	70%	70%	100%
	- Persentase Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	96%	96%	100%
	- Persentase Updating Data Kepegawaian	75%	75%	100%
	- Jumlah Penurunan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	25	13	52%
	- Persentase Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi (Assesment)	15%	15%	100%

	- Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	82%	70%	85%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator 1 :

   Pada Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh telah memproses usulan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh terdiri dari dua periode yaitu periode 1 April dan periode 1 Oktober. Untuk proses usulan kenaikan pangkat tepat waktu golongan III/d kebawah kewenangan pencetakan SK kenaikan pangkat berada di level Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, berkas usulan kenaikan pangkat golongan III/d kebawah periode 1 April diterima dan diproses usulannya pada bulan januari dan dibagikan SK kepada PNS pada bulan maret 2019. Sedangkan untuk periode 1 oktober berkas usulan golongan III/d kebawah diterima dan diproses usulannya pada bulan juni 2019 dan dibagikan SK nya kepada PNS pada bulan September 2019. Sehingga pada saat TMT kenaikan pangkat berlaku, gaji PNS bulan tersebut telah dibayarkan berdasarkan gaji yang baru karena telah diusulkan satu bulan sebelum TMT kenaikan pangkat. Sedangkan golongan IV/a dan IV/b kewenangan pencetakan SK berada pada level Pemerintah Provinsi dan golongan IV/c keatas berada pada level Pemerintah Pusat.

Rincian keseluruhan usulan kenaikan pangkat yang telah diproses pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Golongan III/d kebawah : 557 usulan
- Golongan IV/a keatas : 134 usulan

  Jumlah : **691** usulan

2. Indikator 2 :

   Proses Kenaikan Gaji Berkala (KGB) khusus untuk golongan IV/a ke atas proses dilakukan di BKPSDM Kota Banda Aceh sebanyak 544 SK, sedangkan untuk golongan III/d kebawah proses Kenaikan Gaji Berkala (KGB) pada SKPD masing-masing.

3. Indikator 3 :

   Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yaitu dengan menetapkan metode untuk memantau persepsi pelanggan (aparatur) untuk melihat apakah pelayanan telah memenuhi persyaratan yaitu metode yang digunakan adalah melalui quisoner kepuasan aparatur yang dianalisa secara periodik berkoordinasi dengan masig-masing bidang, hasil analisa dan tindak lanjut yang diperlukan selanjutnya di laporkan kepala BKPSDM Kota Banda Aceh.

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi

Sasaran	Uraian	Indikator Kinerja		
		Target	Realisaisi	%
Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Database Kepegawaian Terkoneksi kedalam Sistem Informasi teknologi	75%	75%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator 1 :

   Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian di BKPSDM Kota Banda Aceh. SIMPEG bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya manusia di Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi terintegrasi, terpadudan reliable dengan cara memberikan potret kondisi kepegawaian terakhir. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dilaksanakan pada unit BKPSDM Kota Banda Aceh sejak tahun 2018 telah terkoneksi ke Seluruh SKPK yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan output:

   1. Terupdatenya data kepegawaian pada sistem informasi manajemen kepegawaian
   2. Tersedianya data kepegawaian yang akurat

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi

Sasaran	Uraian	Indikator Kinerja		%
		Target	Realisaisi	
Meningkatnya Pembinaan dan kompetensi Pegawai	- Jumlah Aparatur Mengikuti Bimbingan Teknis	10 orang	5 orang	50%
	- Terlaksananya Diklat PIM Tingkat IV dan II	PIM IV 30 Orang dan PIM II 2 Orang	-	0%
	- Jumlah PNS yang memperoleh Penghargaan	15 org	16 org	125%
	- Jumlah Aparatur yang	Tubel 2	Tubel 2	201%

	mendapat Bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar	Orang Izbel 85 Orang	Orang, Ikatan Dinas 68 orang dan Izbel 95 Orang	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator 1 :

   Jumlah pembinaan disiplin aparatur yang terealisasi pada tahun 2019 sejumlah 13 orang terdiri dari pembinaan disiplin untuk kasus indisipliner dengan kategori hukuman ringan dan berat.

2. Indikator 2 :

   Indikator jumlah aparatur yang mengikuti diklat penjenjangan dan diklat teknis yaitu;

   - Diklat tekhnis, Fungsional dan kepemikmpinan pada tahun 2019 diselenggarakan sejumlah diklat dengan jumlah peserta mencapai 1.014 orang PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Indikator 3 :

   Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh melalui Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada PNS yang berpretasi sebanyak 16 Orang yaitu:

   - Pemberian penghargaan bagi PNS berupa paket uang kepada 1 orang jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk kategori masa kerja 25 tahun (Staf Ahli Pemerintah Kota Banda Aceh);

- Pemberian Penghargaan berupa Paket uang sebanyak 15 orang PNS untuk Kategori The Best Performance masing-masing Rp. 5.000.000 untuk 15 SKPD.

4. Indikator 4 :

   Pada Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh melalui Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas yaitu :

   - Bantuan Tugas Belajar Strata I sebanyak 2 orang
   - Ikatan Dinas 68 Orang untuk Praja IPDN
   - Bantuan Izin Belajar D-IV Politeknik sebanyak 84 Orang
   - dan bantuan Dana Pendidikan Strata II sebanyak 11 Orang

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi

Sasaran	Uraian	Indikator Kinerja		
		Target	Realisaisi	%
Tersedianya Aparatur Sipil yang memenuhi Standart Kompetensi	- Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi	82%	70%	85%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator 1 :

Pengisian jabatan Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pejabat berdasarkan latar belakang Pendidikan dan Diklat Teknis yang telah di ikuti sebagaimana dipersyaratkan dalam analisis jabatan yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berikut Perbandingan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh pada tingkat sasaran antara Tahun 2018 dan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2018 dan tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Target		Capaian Realisasi	
			2018	2019	2018	2019
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kepegawaian	Persentase Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu	96%	96%	96%	96%
		Persentase Kenaikan Gaji Berkala Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	83	82	83	82
2	Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Database Kepegawaian Terkoneksi kedalam Sistem Informasi teknologi	73%	75%	73%	75%
3	Meningkatnya Pembinaan dan Kompetensi Pegawai	Jumlah Pembinaan Disiplin aparatur	32 orang	25 orang	8 orang	13 orang
		Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Penjenjangan dan Teknis	PIM IV 30 Orang dan PIM II 2 Orang	PIM IV 30 Orang dan PIM II 2 Orang	PIM IV 30 Orang dan PIM II 2 Orang	-
		Jumlah PNS yang memperoleh Penghargaan	15 Orang	15 orang	25 Orang	16 orang

		Jumlah Aparatur yang mendapat Bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar	Tubel 2 Orang Izbel 85 Orang	Tubel 2 Org Izbel 85 org	Tubel 8 Orang, Ikatan Dinas 63 orang dan	Tubel 2 Orang, Ikatan Dinas 68 orang dan Izbel 95 Orang
4	Tersedianya Aparatur Sipil yang memenuhi Standart Kompetensi	Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi	82%	82%	80%	70%

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh secara umum tidak mempunyai kendala yang signifikan sehingga menghambat pencapaian, namun untuk peningkatan kinerja yang lebih optimal dimasa mendatang dapat dilihat dari analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan program dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor pendukung antara lain :
   1. Anggaran yang memadai
   2. Kejelasan dokumen SOP pelayanan administrasi kepegawaian
   3. Sarana dan prasarana yang memadai
   4. Kualitas SDM yang terampil

b. Faktor penghambat antara lain :
   1. Pengesahan APBK yang tidak tepat waktu
   2. Kurangnya koordinasi antar pejabat struktural

3. Kurangnya atau minimnya fasilitas sarana pendukung.

3.2 Realisasi Anggaran

Penyusunan APBK Tahun 2019 berdasarkan pendekatan kinerja yang mengutamakan *output, outcome* dan manfaat dari setiap alokasi biaya yang direncanakan, berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, disiplin, adil, efesien dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran, sedangkan disiplin anggaran dimaksudkan adanya keseimbangan antara pendapatan dan belanja, prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Untuk evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan pada tahun berjalan, maka perlu ditetapkan estimasi dan perkiraan realisasi kinerja program dalam bentuk indikator. Indikator tersebut ditetapkan berdasarkan besarnya kebutuhan anggaran yang dialokasikan kepada SKPD untuk menyusun dan melaksanakan program dalam rangka membangun, dan meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan publik. Sehingga setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan terukur secara jelas kinerjanya. Realisasi atau capaian kinerja merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan tertentu.

Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor : 18/DPA/1.20.19/2019 tanggal 21 Januari 2019 ditetapkan sebesar Rp 13.127.587.661,- (Tiga belas milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) dengan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.023.798.192,- (Enam milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp 7.103.789.469,- (Tujuh milyar seratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

Untuk menampung penyesuaian-penyesuaian kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBKP) ditetapkan menjadi anggaran perubahan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor : 11/DPPA/1.20.19/2019 Tanggal 9 September 2019 sebesar Rp 12.390.255.033,- (Dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah) dengan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.519.581.164,- (Lima milyar lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh empat rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp 6.870.673.869,-(Enam milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan realisasi anggaran 95.64%.

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh merupakan Program untuk mendukung Pelaksanaan Program Utama (Urusan Wajib/Belanja Langsung) terdiri 6 (enam)

Program yang diimplementasikan kedalam 29 (dua puluh sembilan) kegiatan Prioritas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan BKPSDM Kota Banda Aceh
Tahun Anggaran 2019

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA DAERAH		**12.390.255.033,-**	**11.850. 533.801,-**	**95,64%**
I. Belanja Tidak Langsung		**5.519.581.164,-**	**5.437.792.487,-**	**98,52%**
II. Belanja Langsung		**6.870.673.869,-**	**6.412.741.314,-**	**93,33%**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		**1.845.737.520,-**	**1.811.601.562,-**	**98,15%**
1.	Penyedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik	467.353.126,-	448.416.918,-	95,95%
2.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13.120.500,-	13.120.500,-	100%
3.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	87.662.300,-	87.637.300,-	99,97%
4.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	119.412.850,-	118.962.850,-	99,62%
5.	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.509.044,-	14.509.044,-	100%
6.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	93.369.700,-	93.365.000,-	99,99%
7.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	520.250.000,-	513.812.916,-	98,76%
8.	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	530.060.000,-	521.777.034,-	98,44%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**291.846.349,-**	**288.735.752,-**	**98,93%**
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	110.610.000,-	110.610.000,-	100%
2.	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor	9.500.000,-	9.500.000,-	100%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	59.862.400,-	56.751.803,-	94,80%
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	111.873.949,-	111.873.949,-	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		**0,-**	**0,-**	**0%**
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,-	0,-	0%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		**26.000.000,-**	**20.066.500,-**	**77,18%**
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	26.000.000,-	20.066.500,-	77,18%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		**1.019.087.500,-**	**1.017.437.500,-**	**99,84%**
1.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	1.019.087.500,-	1.017.437.500,-	99,84%
2.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	0,-	0,-	0%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		**3.688.002.500,-**	**3.274.900.000,-**	**88,80%**
1.	Seleksi Penerimaan Calon PNS	715.190.000,-	444.760.000,-	62,19%
2.	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	95.450.000,-	89.350.000,-	93,61%
3.	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	41.000.000,-	39.950.000,-	97,44%
4.	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	65.680.000,-	64.800.000,-	98,66%
5.	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi	152.650.000,-	150.600.000,-	98,66%
6.	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	41.820.000,-	41.082.500,-	98,24%
7.	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	1.485.600.000,-	1.485.600.000,-	100%
8.	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	144.682.500,-	92.322.500,-	63,81%
9.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	126.895.000,-	126.545.000,-	99,72%
10.	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	61.850.000,-	53.990.000,-	87,29%
11.	Seleksi dan Rekrutmen Tenaga Honorer/Kontrak	97.160.000,-	96.060.000,-	98,87%
12.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	64.475.000,-	59.900.000,-	92,90%
13.	Pelaksanaan Proses Seleksi Jabatan	595.550.000,-	529.940.000,-	88,98%
	TOTAL	**12.390.255.033,-**	**11.850. 533.801,-**	**95,64%**

Dari tabel tersebut dapat dilihat secara keseluruhan realisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun anggaran 2019 yang direncanakan sebesar

Rp.12.390.255.033,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp.11.850.533.801,- atau 95,64 persen.

Perbandingan realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dari Tahun Anggaran 2017 hingga Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran BKPSDM Kota Banda Aceh

No	Tahun	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	2019	12.390.255.033	11.850.533.801	95,64%	539.721.232	4,36%
2	2018	11.200.731.915	10.796.390.347	96,39%	404.341.568	3,61%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh adanya peningkatan. Dilihat dari realisasi Anggaran dan pencapaian target setiap tahunnya menunjukkan kinerja yang sangat baik, pencapaian realisasi Tahun 2018 sebesar 96,39% dengan sisa anggaran 3,61%, sedangkan pada Tahun 2019 adanya peningkatan realisasi sebesar 95,64% dengan sisa anggaran 4,36%, hal ini dikarenakan semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun melalui Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Tabel 3.9
Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja BKPSDM Kota Banda Aceh
Tahun 2015 Sampai Dengan 2019

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(17)	(18)
BELANJA	**10.103.594.760**	**8.767.480.447**	**8.643.704.149**	**11.200.731.915**	**12.390.255.033**	**9.044.542.160 (89,52%)**	**8.399.276.763 (95,80%)**	**8.465.857.117 (97,94)**	**10.796.390.347 (96,39)**	**11.850.533.801 (95,64)**	**4,16%**	**5,55%**
Belanja Tidak Langsung	**5.981.419.397**	**5.272.170.778**	**5.027.825.180**	**5.615.482.446**	**5.519.581.164**	**5.347.881.830 (89,41%)**	**4.969.514.295 (94,26%)**	**4.939.520.807 (98,24)**	**5.481.687.546 (97,62)**	**5.437.792.487 (98,52)**	**-1,59%**	**0,33%**
- Belanja Pegawai	5.981.419.397	5.272.170.778	5.027.825.180	5.615.482.446	5.519.581.164	5.347.881.830 (89,41%)	4.969.514.295 **(94,26%)**	4.939.520.807 (98,24)	5.481.687.546 (97,62)	5.437.792.487 (98,52)	-1,59%	0,33%
Belanja Langsung	**4.122.175.363**	**3.495.309.669**	**3.615.878.969**	**5.585.249.469**	**6.870.673.869**	**3.696.660.330 (89,68%)**	**3.429.762.468 (98,12%)**	**3.526.336.310 (97,52)**	**5.314.702.801 (95,16)**	**6.412.741.314 (93,33)**	**10,76%**	**11,65%**
- Belanja Pegawai	487.149.000	441.540.000	445.725.000	748.990.000	1.219.520.000	451.539.666 (92,69%)	440.773.345 (99,83%)	442.773.600 (99,34)	741.746.880 (99,03)	1.179.575.152 (96,72)	20,14%	21,17%
- Belanja Barang dan Jasa	3.267.708.363	2.865.384.669	3.004.233.969	4.730.359.469	5.540.543.869	2.893.332.164 (88,54%)	2.800.604.014 (97,74%)	2.917.742.710 (97,12)	4.467.055.921 (94,43)	5.122.556.162 (92,46)	11,14%	12,10%
- Belanja Modal	367.318.000	188.385.000	165.920.000	105.900.000	110.610.000	351.788.500 (95,77%)	188.385.000 (100%)	165.820.000 (99,94)	105.900.000 (100)	110.610.000 (100)	-21,34%	-20,66%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Instansi sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh terus melakukan upaya-upaya strategis demi pencapaian optimalisasi kinerja organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dalam periode 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh selama Tahun 2019 dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan.

Dokumen ini berupaya memaparkan tujuan, sasaran, indikator kinerja yang didukung seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2019 dengan seluruh hasil capaian sasaran yang diukur melalui pencapaian dari indikator kinerja.

Demikian hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Kota Tahun 2019 disusun sebagai bahan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang akan datang.

Pohon Kinerja Ssasaran BKPSDM Kota Banda Aceh

VISI : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari'ah

MISI 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

SASARAN RPJM : Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi

TUJUAN SKPD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

SASARAN SKPD : Terwujudnya SDM Aparatur yang Berintegrasi dan Profesional

INDIKATOR SASARAN	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat		Jumlah Calon ASN yang direkrut sesuai dengan Formasi yang dibutuhkan	Jumlah Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi (Asessment)	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diisi melalui Seleksi Terbuka
PROGRAM	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		
KEGIATAN	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Seleksi Calon ASN yang direkrut sesuai dengan Formasi yang dibutuhkan	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Pelaksanaan Proses Seleksi Jabatan

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017-2022

VISI : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari'ah
MISI 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
SASARAN RPJM : Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi
TUJUAN SKPD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik
SASARAN SKPD : Terwujudnya SDM Aparatur yang Berintegrasi dan Profesional

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Tertibnya Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	35%	20%	70%	71%	71%	71%
			Persentase Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	95%	96%	96%	97%	97%	97%
			Persentase Updating Data Kepegawaian	70%	73%	75%	77%	79%	80%
			Jumlah Penurunan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	32	32	25	25	19	19
			Persentase Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi (Assesment)	-	-	15%	23%	23%	23%
			Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	82%	82%	82%	85%	85%	85%

PERJANJIAN KINERJA

Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH

Tahun Anggaran : 2019

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
	Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	70%
		Persentase Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	96%
		Persentase Akurasi Updating Data Kepegawaian	75%
		Jumlah Penurunan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	25 orang
		Persentase Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi (Assessment)	15%
		Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	82%

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1.783.558.750	Sumber Dana APBK
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	328.878.889	Sumber Dana APBK
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	37.950.000	Sumber Dana APBK
4	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Rp	50.000.000	Sumber Dana APBK
5	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Rp	704.764.500	Sumber Dana APBK
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp	3.845.237.330	Sumber Dana APBK
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**6.750.389.469**	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2019

SASARAN			PROGRAM		KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
Meningkatnya kemampuan aparatur dalam rangka pegelolaaan dan pelayanan adiminstrasi perkantoran (1.1.1)	- Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	1. Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		**Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik**	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Hasil - tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	 Rp Bulan %	 623.680.000 12 20	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor yang di sediakan Hasil - tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	 Rp Bulan %	 10.215.600 12 20	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Hasil - tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	 Rp Jenis %	 87.912.300 80 20	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset
					Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang disediakan Hasil - tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	 Rp Jenis %	 104.490.750 14 20	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET.
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	12.208.100	**Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset**
					Keluaran Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	20	
					Hasil tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	18	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	95.592.000	**Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset**
					Keluaran - Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	Porsi	6.776	
					Hasil - tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	20	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	607.310.000	**Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset**
					Keluaran - Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	Laporan	Rp 40	
					Hasil - tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	20	
				Penyediaan/Peningkatan Jasa Administrasi kantor	Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	595.550.000	**Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
					Keluaran Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan	Bulan	12	
					Hasil tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	20	

SASARAN				PROGRAM		KEGIATAN				
URAIAN		INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	-	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang disediakan Hasil - tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	 Rp Bulan %	 129.478.240 12 20	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset
						Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang dilaksanakan Hasil - tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	 Rp Kali %	 24.000.000 2 20	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset
						Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasional	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang Hasil - tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	 Rp Kali %	 64.100.000 120 20	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dilaksanakan Hasil - tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	 Rp Kali %	 111.300.649 240 20	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset
Meningkatnya Pembinaan dan kompetensi Pegawai (3.1.1)	-	Meningkatnya disiplin pegawai	12 bulan	3.	Peningkatan Disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan yang disediakan Hasil - Keseragaman Pakaian Dinas	 Rp Orang %	 37.950.000 69 20	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset

SASARAN				PROGRAM		KEGIATAN					KET.
URAIAN		INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)				URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
	-	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12 bulan	4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pendidikan dan pelatihan Formal	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Hasil - Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Rp Orang %	50.000.000 10 20	Kasubbid Pengembangan Kompetensi ASN
	-	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		5.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah PNS/Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat PIM IV, PIM III dan PIM II Hasil - tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan/bimbingan teknis	Rp Orang %	704.764.500 PIM IV 30 org, PIM III 5 Org dan PIM II 2 org 20	Kabid. Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur
Meningkatnya pengelolaan sistim informasi kepegawaian (2.1.1)	-	Persentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		6.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Seleksi Penerimaan CPNS	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah peserta Seleksi CPNSD / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Hasil - tersedianya CPNSD / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan pemerintah kota banda aceh	Rp Orang %	408.155.000 130 20	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja
							Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Persentase Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis bagi ASN Reguler Gol.III/d ke Bawah Hasil - persentase pegawai naik pangkat otomatis reguler Gol.III/d ke bawah	Rp % %	41.550.000 96 96	Kasubbid Kepangkatan

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
				Pembangunan /Pengembangan Sistem Informasi dan Kepegawaian Daerah	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang Tertib Administrasi berbasis Elektronik Hasil - penyajian data kepegawaian yang akurat	**Rp** **%** **%**	**29.960.000** **75** **73**	**Kasubbid Data dan Informasi**
				Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan Pegawai	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan PNS Hasil - pemetaan ASN sesuai kebutuhan berdasarkan perka BKN nomor	**Rp** **Dokumen** **%**	**38.362.500** **20** **40**	**Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja**
				Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah PNS yang mendapatkan Penghargaan Hasil - Peningkatan kinerja PNS	**Rp** **Orang** **%**	**237.675.000** **15** **20**	**Kasubbid. Pengembangan Sumber Daya Kepegawaian**
				Proses penangganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah Penanganan Kasus-kasus PNS Hasil - Persentase Penurunan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	**Rp** **Kasus** **%**	**31.670.000** **32** **16**	**Kasubbid. Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai**
				Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran - Jumlah Laporan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas Hasil - Persentase Meningkatnya Bantuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas	**Rp** **Laporan** **%**	**1.875.172.330** **87** **20**	**Kasubbid. Pengembangan Kompetensi ASN**

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET.
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
				Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan	**Rp**	**162.550.000**	**Kasubbid Diklat dan Sertifikasi**
					Keluaran - Jumlah peserta Diklat Teknis/Fungsional dan Kepemimpinan	**Orang**	**1100**	
					Hasil - persentase meningkatnya diklat Teknik/fungsional dan kepemimpinan	**%**	**15**	
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan	**Rp**	**152.000.000**	**Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja**
					Keluaran - Jumlah instansi yang dilaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian	**OPD**	**8 OPD, 3 UPTD, 1 UPTB, 16 SD dan 4 SMP**	
					Hasil Meningkatnya Disiplin dan Kinerja	**%**	**20**	
				Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan	**Rp**	**64.000.000**	**kasubbid Mutasi dan Promosi**
					Keluaran - Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	**Kali**	**8**	
					Hasil Persentase Tertib administrasi kepegawaian	**%**	**20**	
				Seleksi dan Rekruitmen Tenaga Honorer /Kontrak	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan	**Rp**	**200.810.000**	**Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja**
					Keluaran - Jumlah Tenaga Non PNS yang dievaluasi Kinerja Sesuai Kebutuhan	**Orang**	**50**	
					Hasil Tersedianya Tenaga Non PNS	**%**	**20**	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KET.
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
				Pembinaan dan Peningkatan kapasitas aparatur	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan	**Rp**	**102.762.500**		**Kasubbid. Formasi dan Pengadaan**
					Keluaran - Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur yang dilaksanakan	**Kali**	**1**		
					Hasil - Persentase meningkatnya Prestasi Aparatur	**%**	**20**		
				Pelaksanaan Proses Seleksi Jabatan	Masukan - Jumlah dana yang dibutuhkan	**Rp**	**500.570.000**		**Kabid Mutasi, Promosi dam Informasi**
					Keluaran - Jumlah Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	**Kali**	**3**		
					Hasil - Persentase tersedianya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	**%**	**20**		

PENGUKURAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2019

INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH
TAHUN : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12 Bln	12 Bulan	100%
		Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor yang di sediakan	12 Bln	12 Bulan	100%
		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	80 jenis	80 Jenis	100%
		Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang disediakan	14 jenis	14 Jenis	100%
		Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 jenis	18 Jenis	100%
		Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	6776 porsi	6776 porsi	100%
		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	42 laporan	42 laporan	100%
		Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bln	12 Bulan	100%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	100%
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan	120 Kali	120 Kali	100%
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dilaksanakan	240 kali	240 kali	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan yang disediakan	63 orang	-	0%
4	MeningkatnyaKapasitas Sumber daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis	10 orang	6 orang	60%
5	Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Jumlah peserta Diklat Prajabatan	130 orang	114 orang	88%
		Jumlah PNS/Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat PIM IV, PIM III dan PIM II	PIM II 2 orang dan PIM IV 30 orang	-	0%
6	Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Jumlah peserta Seleksi CPNSD / PPPK	140 orang	254 orang	181%
		Persentase Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis bagi ASN	96%	96%	100%
		Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang Tertib Administrasi berbasis Elektronik	75%	75%	100%
		Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan PNS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah PNS yang mendapatkan Penghargaan	15 orang	16 orang	107%
		Jumlah Penanganan Kasus-kasus PNS	25 orang	13 orang	52%
		Jumlah Laporan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas	Tubel 2 Orang Izbel 85 Orang	Tubel 2 Orang, Ikatan Dinas 68 orang dan Izbel 95 Orang	190%
		Jumlah peserta Diklat Teknis/Fungsional dan Kepemimpinan	1200 orang	807 orang	67%
		Jumlah instansi yang dilaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian	8 OPD, 3 UPTD, 1 UPTB, 16 SD dan 4	8 OPD, 3 UPTD, 1 UPTB, 16 SD dan 4 SMP	100%
		Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	8 kali pelantikan	3 kali pelantikan	38%
		Jumlah Tenaga Non PNS yang dievaluasi Kinerja Sesuai Kebutuhan	50 orang	166 orang	332%
		Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
		Jumlah Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	3 kali	1 kali	33%